

» PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

» TINJAUAN TERHADAP SUB-SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

» MENINGKATKAN PERENCANAAN TENAGA GURU DI ACEH

» EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA



Foto: BKLM Kemendikbud

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka mencapai tujuan utama program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu meningkatkan kapasitas anak-anak (mulai baru lahir hingga usia 6 tahun) dalam belajar dan berkembang, layanan PAUD harus memiliki kualitas yang tinggi. Penyedia layanan PAUD tentu harus bertanggung jawab atas kualitas tersebut. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan hal ini.

Kebutuhan untuk menetapkan sebuah sistem penjaminan mutu yang efektif sudah sangat mendesak. Langkah awal bagi pembuatan sistem tersebut telah dimulai dalam bentuk kerangka kerja regulasi, peraturan pemerintah dan perencanaan strategis kementerian, serta melalui penetapan standar nasional pelayanan PAUD. Di tahap ini, yang terpenting adalah untuk memastikan implementasi peraturan-peraturan tersebut secara efektif dan memantapkan jalannya proses untuk menjamin layanan pendidikan yang diberikan sesuai standar mutu.

Studi yang diselenggarakan secara singkat ini dilakukan di 4 kabupaten yaitu di Sukabumi - Jawa Barat, Pringsewu - Lampung, Banjar - Kalimantan Selatan dan Sumba Barat - Nusa Tenggara Timur. Sebagai tambahan dari kunjungan langsung ke lapangan, studi awal ini juga melakukan kajian literatur terkait implementasi sistem penjaminan mutu di negara-negara lain. Penjaminan mutu sendiri merujuk pada sebuah proses pemeriksaan yang sistematis dan efektif apakah layanan pendidikan yang diberikan sudah memenuhi syarat, ketentuan atau standar tertentu.

Berdasarkan data/informasi yang dihimpun dan didukung studi literatur yang dilakukan oleh ACDP, sebuah rancangan awal bagi

sistem penjaminan mutu PAUD dibuat, utamanya untuk membenahi mutu PAUD non-formal atau non-TK di tingkat kabupaten. Institusi PAUD non-formal ini sendiri mendominasi 58% dari jumlah total keberadaan institusi PAUD di seluruh tanah air yang umumnya sangat miskin sumberdaya dan sangat lemah dalam hal sistem penjaminan mutu.

Temuan-temuan dalam studi ini mengungkapkan bahwa:

(i) koordinasi antara Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) dan unit-unit kerja lainnya dalam hal implementasi penjaminan mutu PAUD sangatlah lemah, setiap unit yang terlibat dalam kegiatan penjaminan mutu cenderung tersegmentasi berdasarkan fungsi dan pekerjaan mereka masing-masing;

(ii) banyak pemangku kepentingan PAUD dalam pemerintah - mulai dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten - tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang peraturan dan proses penjaminan mutu PAUD. Hal ini pun berujung pada lemahnya implementasi di lapangan;

(iii) tantangan utama untuk mencapai standar nasional pendidikan terkait PAUD adalah di seputar kualifikasi dan kompetensi guru, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, serta pembiayaan layanan ini. Sebagai contoh, jumlah pengawas dan inspektur - yang adalah ujung tombak bagi penjaminan mutu di lapangan - sangatlah terbatas, dengan kualifikasi dan kompetensi yang sangat rendah untuk menjalankan tanggung jawab sebesar itu.

Temuan utama dari studi ini mengemukakan bahwa meski tanggapan publik terhadap manfaat dan kebutuhan akan layanan PAUD tampak

positif, namun terdapat kesalahpahaman bahwa standar kualitas PAUD diukur dari kemampuan anak didik-nya membaca dan berhitung di usia dini.

Kesalahpahaman besar ini tampaknya merupakan akibat dari mispersepsi terhadap tuntutan bahwa anak harus sudah dapat membaca, menulis dan berhitung di kelas 1 agar dapat menyesuaikan diri dengan konten 'tematik' yang diajarkan dalam Kurikulum 2013 yang baru. Sejatinya, peran PAUD adalah untuk memberikan rangsangan pra-literasi dan pra-numerasi sebagai persiapan pengembangan kemampuan membaca dan berhitung di tingkat sekolah dasar.

Implementasi model Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mengaitkan antara aspek pendidikan, kesehatan, perawatan/penitipan, pengasuhan dan perlindungan anak, juga dikaji melalui studi ini.

Berdasarkan temuan lapangan yang sangat kaya tersebut, studi ACDP 022 ini menyajikan sejumlah opsi kebijakan yang spesifik bagi perancangan dan implementasi sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Studi ini selesai di waktu yang sangat tepat seiring pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, dan membuka jalan bagi pertimbangan akan pentingnya fungsi penjaminan mutu PAUD untuk dijalankan dan difasilitasi di bawah pengaturan organisasi yang baru.

Tinjauan Terhadap Sub-Sektor Pendidikan Islam di Indonesia

ACDP bermitra dengan Kementerian Agama dalam penyusunan Tinjauan Sub-sektor Pendidikan Islam di Indonesia atau *Overview of Islamic Education Sub-sector in Indonesia* yang menyajikan potret menyeluruh dan situasi terkini sub-sistem pendidikan Islam di Indonesia serta isu-isu strategis yang dihadapinya.

Foto: BKLM Kemendikbud



Laporan ini mencakup konteks sejarah dan posisi Sub-Sektor Pendidikan Islam dalam konteks pembangunan nasional termasuk dimensi sosial, ekonomi dan politik, terutama yang terkait dengan sistem pendidikan nasional secara umum. Isu-isu strategis dalam dimensi-dimensi tersebut terkait dengan akses, kualitas, manajemen dan pembiayaan.

Laporan ini juga menyajikan tinjauan yang mendalam atas berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang ada dalam Sub-Sektor Pendidikan Islam, serta mengeksplorasi lebih jauh karakter-karakter khas dari tiap jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh, status dan peran madrasah sebagai pendidikan umum namun berkarakter Islam dibahas dalam studi ini. Lebih jauh dijelaskan bagaimana pendidikan madrasah diimplementasikan merujuk pada undang-undang, peraturan dan standar pendidikan di Indonesia. Sementara bahasan mengenai pendidikan pesantren dipresentasikan dengan mengangkat keunikannya, dimana pesantren menekankan fokus pada kurikulumnya. Analisis perbandingan pesantren dengan jenis pendidikan serupa di negara lain pun melengkapi tinjauan ini.

Tinjauan Sub-sektor Pendidikan Islam di Indonesia digunakan sebagai referensi utama bagi persiapan penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam 2015-2019. Ini adalah sebagai laporan pertama yang pernah dibuat dan menjadi rujukan penting bagi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Laporan ini akan dipublikasikan dalam bentuk buku, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di pertengahan tahun 2015.

Meningkatkan Perencanaan Tenaga Guru di Aceh

ACDP membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya membangun kebijakan yang berbasis fakta untuk memperkuat perencanaan dan implementasi layanan di sektor pendidikan. Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) Provinsi bertanggung jawab untuk memimpin studi kebijakan ini, berkolaborasi dengan kantor dinas, sekolah, institusi penelitian di universitas dan para pemangku kepentingan terkait lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Satu dari tiga studi kebijakan tersebut rampung baru-baru ini.

Studi dengan topik *Meningkatkan Perencanaan dan Manajemen Guru di Aceh* ini fokus pada pengembangan kebijakan, rencana, sistem dan kapasitas demi distribusi guru yang lebih merata dan lebih efisien di Provinsi Aceh. Biaya pendidikan Indonesia ditengarai terus membengkak tanpa berkelanjutan dan ini secara signifikan terkait dengan biaya untuk guru. Oleh sebab itu, studi ini fokus pada cara mengoptimalkan efisiensi peran dan kerja guru.

Studi ini mengidentifikasi empat hal utama; *Pertama*, secara umum ada terlalu banyak jumlah guru namun kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di seluruh jenjang sekolah, terdapat 1 guru untuk 9-10 murid, yang mengakibatkan adanya kelebihan sebanyak 20.000 guru.

Kedua, distribusi guru tidaklah merata di seluruh area geografis dan di area mengajar. Aceh memiliki begitu banyak sekolah kecil

di daerah-daerah terpencil (sekitar 37% SD dan SMP dengan murid di bawah 100 orang). Guru, terutama guru PNS, berkeberatan untuk bekerja di sekolah-sekolah ini, tidak hanya karena lokasinya yang terpencil namun juga karena terlalu rendahnya beban mengajar. Terdapat ketimpangan besar dalam hal ketersediaan guru di seluruh program studi – dan kondisi ini bervariasi sesuai situasi kabupaten/kota.

Ketiga, institusi-institusi pendidikan guru (LPTK) menghasilkan begitu banyak lulusan, melampaui jumlah guru baru yang dibutuhkan. Umumnya institusi-institusi ini berstatus swasta dan berada di peringkat akreditasi yang rendah. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan institusi-institusi pendidikan tenaga kependidikan ini terbukti lemah.

Keempat, selama dua dekade mendatang Aceh akan diuntungkan dengan adanya 'bonus gelombang besar pensiun' yang akan dimulai dari tingkat pendidikan dasar.

Lebih jauh, studi ini mengidentifikasi opsi-opsi strategis secara luas untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga guru. Hal ini termasuk, misalnya, memperkuat sistem dan kontrol terhadap perekrutan guru non-PNS, meningkatkan kualitas seleksi yang berdasarkan kelayakan, mendorong implementasi peraturan-peraturan yang ada (utamanya peraturan tahun 2011 tentang struktur dan distribusi pegawai negeri), serta memperkuat koordinasi dan proses perencanaan.

Laporan ini juga menggarisbawahi sejumlah implikasi terhadap kebijakan nasional termasuk, misalnya tentang norma dan standar rombongan belajar serta pengaturan staf, kebutuhan untuk mempertimbangkan pendekatan pengajaran multi-kelas dan multi-mata pelajaran (serta hubungannya dengan pengembangan guru), dan perlunya memperkuat peraturan yang terkait dengan operasi lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pendidikan di Provinsi Papua

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti komputer, internet, teknologi nirkabel dan bahkan televisi atau radio saat ini telah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari. TIK mengubah cara bagaimana informasi dihasilkan, disimpan, diproses, didistribusikan dan dipertukarkan. Pendidik di seluruh dunia mengakui bahwa TIK berpotensi membuka akses kepada lebih banyak pelajar dan di saat yang bersamaan memberikan solusi – tidak hanya soal akses – tetapi juga soal keadilan informasi dan keterbatasan sumber daya.



Hal ini sepenuhnya berlaku di daerah-daerah terpencil yang tersebar di Papua, dimana TIK memberi harapan dapat menghubungkan murid dan guru dengan informasi yang mungkin tidak tersedia dan membantu mereka memperoleh keterampilan abad 21. Papua sendiri telah menginisiasi berbagai program TIK di sekolah-sekolah mereka. Contohnya, program TV Edukasi yang telah berhasil mengoperasikan dua salurannya untuk kepentingan pendidikan; satu untuk murid dan satu untuk guru.

Sebanyak 1.135 sekolah telah menerima perangkat keras TIK dan sebanyak 1.500 guru telah menerima manfaat dari pengembangan profesional melalui Badan Pengembangan Pendidikan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua. Hampir dari seluruh inisiatif baru ini telah mendapatkan umpan balik yang positif dari para praktisi dan administrator pendidikan.

Dalam rangka mendukung dan melanjutkan inisiatif TIK Papua, ACDP melakukan studi yang diberi nama "Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pendidikan di Provinsi Papua" yang ditujukan untuk melihat efektivitas dan dampak program seperti TV Edukasi, serta untuk memberikan rekomendasi bagi berbagai inisiatif terkait pemanfaatan TIK dalam kegiatan pendidikan di masa depan. Studi ini dirancang untuk mengkaji ketersediaan dan jangkauan infrastruktur TIK secara geografis serta untuk mengevaluasi program-program TIK tersebut, selain untuk mencapai sejumlah tujuan lainnya. Pertanyaan penting yang mengemuka: Hingga tahap mana TIK digunakan di Papua? Mengapa TIK tidak digunakan secara lebih sering dan lebih efektif?

Studi ini mengungkapkan bahwa TIK tidak digunakan secara rutin di sekolah-sekolah di Papua. Hanya 30%-40% responden yang memanfaatkan saluran TV Edukasi dan CD/DVD. Hanya 10%-20% responden yang terindikasi menggunakan program-program TIK lainnya seperti Portal Rumah dan School Net. Dari jumlah guru yang menggunakan berbagai bentuk TIK, sekitar 70% dari mereka

menggunakannya untuk keperluan administrasi dan bukan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai tambahan, hanya sekitar 20% murid yang dilaporkan menggunakan TIK paling tidak secara mingguan.

Rendahnya penggunaan TIK ini antara lain karena ketiadaan listrik, ketiadaan layanan internet yang handal, dan/atau ketiadaan perangkat keras di Papua. Hanya 30% dari wilayah Papua yang dilengkapi listrik, dan suplai listrik di wilayah urban maupun sub-urban-nya tidak stabil. Studi ini menyoroti pentingnya sekolah-sekolah terpencil untuk memecahkan masalah listrik dan memikirkan alternatif sumber daya lain seperti solar, angin, panas bumi dan tenaga air skala mini. Terkait konektivitas internet dan perangkat kerasnya, tercatat 73% murid tidak memiliki akses internet di sekolah, dan 50% sekolah terbukti hanya memiliki 1-2 perangkat keras atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Ditemukan banyak peralatan TIK yang rusak di sekolah dengan hanya sedikit dana – atau sama sekali tidak ada dana – untuk perawatan dan pembelian alat baru.

Alasan lebih jauh mengapa penggunaan TIK di Papua rendah adalah karena para guru sendiri tidak dilatih untuk menggunakan TIK, dan bahkan ketika sejumlah pelatihan diberikan, mereka tidak dibiasakan untuk menggunakan TIK dalam kurikulum. 20%-30% guru dan kepala sekolah mengaku TIK sulit untuk dimengerti dan merasa frustrasi. Sebanyak 95% percaya bahwa mereka perlu meningkatkan keterampilan mereka sendiri sebelum dipersilahkan menggunakan TIK.

Kebanyakan guru berada dalam ambang yang diistilahkan UNESCO sebagai 'literasi teknologi'. Guru-guru ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang TIK dan pemanfaatannya, jika mereka ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi, menggunakan TIK untuk

memperdalam proses belajar murid dan membangun keterampilan abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, yang menuntut murid untuk mengambil manfaat besar dari TIK dalam rangka memotivasi belajar secara mandiri.

Terlepas dari rendahnya pemanfaatan TIK, mereka yang mengakses layanan-layanan TIK umumnya memberi respon positif atas manfaat yang bisa mereka rasakan. Umumnya, guru, kepala sekolah dan murid yang memiliki akses terhadap TIK percaya bahwa TIK membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi serta mempelajari hal-hal kreatif.

Oleh sebab itu, laporan ini merekomendasikan peningkatan manfaat penggunaan TIK dalam pendidikan, dengan menekankan bahwa Papua perlu fokus dalam mengimplementasikan rencana secara hati-hati untuk menghindari 'jebakan' masa lalu dan agar dapat memanfaatkan TIK secara sistematis. Murid akan perlu memiliki akses terhadap berbagai jenis perangkat, beragam jenis piranti lunak dan kesempatan untuk menggunakan TIK. Hal ini dimungkinkan jika setiap sekolah memiliki alokasi dana untuk membeli peralatan baru dan untuk merawat serta memperbaiki alat.

Guru dan kepala sekolah pun perlu memiliki kesempatan bagi pengembangan profesi untuk meningkatkan pemanfaatan TIK, serta untuk membangun kemampuan pedagogis dalam kegiatan belajar-mengajar. Di atas semua itu, bagaimana pun juga, keberhasilan dari berbagai inisiatif penggunaan TIK dalam pendidikan di Papua ini terpulang kepada penyediaan tenaga listrik yang memadai dan pengadaan infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran.

Riset, studi dan pekerjaan-pekerjaan analitis lainnya tersedia di website ACDP: www.acdp-indonesia.org

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui **Australian Aid**, **Uni Eropa (UE)**, dan Bank Pembangunan Asia (**Asian Development Bank/ADB**) telah membentuk **Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP)**. ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (**Education Sector Support Program/ESSP**). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. *Newsletter* ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAid dan Uni Eropa melalui ACDP.

**Sekretariat ACDP
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
(BALITBANG)**

Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Tel. : (021) 578-51100
Fax: (021) 578-51101
Email : sekretariat@acdp-indonesia.org
Website : www.acdp-indonesia.org

